

## **POPULISME DI INDONESIA: ANCAMAN BAGI INTEGRITAS MASYARAKAT DAN REAKTUALISASI PANCASILA**

**Feridus Welak**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana  
Email: welakferidus@gmail.com

### ***Abstract***

*This paper focuses on the theme of populism in Indonesia that threatens the integrity of society. The phenomenon of populism in Indonesia affiliated with certain identity politics (religions-cultures) has the potential to accompany the society and or the state to divide with each other. Actualizing Pancasila as a basic foundation to overcome the occurrence of divisions in society in particular and Indonesia at large. Populism movements that facilitate religious-culture-based identity propositions for their political strategies and maneuvers have an effect on the integrity of society. Religious-cultural issues are able to burn sentimental societies and mobilize political forces. Based on Pancasila as the basis of the state, Indonesia has committed to overcoming identity-based politics. Pancasila as the basis of the state is believed to be born and formed by the existence of the same life values among the Indonesian people. Pancasila wraps and established the plurality of Indonesia without any discrediting and discriminating behavior against each other. The reactualization of Pancasila is an inevitability and a fundamental step to re-crystallize pancasila values and stem the identity politics movement that divides society. This critical study is intended to investigate the impact of populism on the integrity of society. Pancasila was appointed as a basis for overcoming identity politics and maintaining community unity. As for the findings in this paper that the identity politics of populism is contrary to the spirit of Pancasila and Indonesianness. Actualizing Pancasila is very urgently needed to stem the phenomenon of populism for the integrity of society.*

**Keywords:** *Populism in Indonesia; Identity Politics; Disintegrity; Reactualization of Pancasila; Integrity.*

### **Abstrak**

Tulisan ini meletakkan fokus pada tema populisme di Indonesia yang mengancam integritas masyarakat. Fenomena populisme di Indonesia yang berafiliasi dengan politik identitas (agama-budaya) tertentu berpotensi menggiring masyarakat dan atau negara pada perpecahan satu sama lain. Mereaktualisasikan Pancasila sebagai landasan dasar mengatasi terjadinya perpecahan dalam masyarakat secara khusus dan keindonesiaan secara luas. Gerakan populisme yang memfasilitasi dalil-dalil identitas berbasis agama-budaya untuk strategi dan manuver politiknya sungguh berpengaruh terhadap integritas masyarakat. Isu agama-budaya mampu membakar sentimental masyarakat dan memobilisasi kekuatan politik. Berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi politik berbasis identitas. Pancasila sebagai dasar negara diyakini lahir dan dibentuk oleh adanya nilai-nilai hidup yang sama di antara suku bangsa Indonesia. Pancasila membungkus dan mendaulatkan pluralitas Indonesia tanpa adanya perilaku saling mendiskreditkan dan mendiskriminasi satu dengan yang lain. Reaktualisasi Pancasila merupakan keniscayaan dan langkah fundamen untuk mengkristalkan kembali nilai-nilai Pancasila dan membendung gerakan politik identitas yang memecahbelahkan masyarakat. Studi kritis ini dimaksudkan untuk menyelidiki dampak dari populisme terhadap integritas masyarakat. Pancasila

diangkat sebagai dasar untuk mengatasi politik identitas dan tetap menjaga kesatuan masyarakat. Adapun temuan dalam tulisan ini bahwa politik identitas populisme bertolak belakang dengan semangat pancasilais dan keindonesiaan. Mereaktualisasikan Pancasila sangat urgen diperlukan untuk membendung fenomena populisme untuk menjaga integritas masyarakat.

**Kata Kunci:** Populisme di Indonesia; Politik Identitas; Disintegritas; Reaktualisasi Pancasila; Integritas.

## A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini fenomena populisme menyedot perhatian publik dan banyak diperbincangkan di negara tercinta ini “Indonesia” tentu tidak tanpa alasan. Alasannya sederhana: negara sedang dalam ancaman. Populisme di Indonesia yang berafiliasi dengan politik identitas (agama dan budaya) mengancam integritas masyarakat yang mampu menggiring masyarakat dan atau negara pada perpecahan. Politik identitas dibungkus agama dan budaya memiliki andil besar untuk memantik sentimental dan menarik simpati militan pengikut kelompok identitas tertentu. Populisme berbasis politik identitas memobilisasi kekuatan masa dan bertendensi mengabaikan keberadaan individu atau kelompok di luar dirinya. Terjadi gejala saling mengEksklusivisme berdasarkan agama dan budaya. Fenomena demikian jelas menyerang dan menggoyahkan integritas bangsa.

Indonesia sebagai suatu bangsa-negara merangkul dan mendaulatkan pluralitas (budaya, agama, dan ras) tanpa ada diskriminasi satu dengan yang lain. Terdapat kesediaan mengakui dan menerima masing-masing nilai dari golongan atau kelompok. Dalam usaha mengayomi pluralitas, para pendiri bangsa (*founding fathers*) merumuskan dan menetapkan satu asas fundamen dimana di atas itulah negara berdiri. Pancasila difondasikan sebagai asas mendasar bagi Indonesia. Di atas dan di dalam Pancasila Indonesia berdiri tegak. Demikianlah Pancasila merangkul, menyatukan dan mendaulatkan keberagaman yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Kemunculan populisme berbasis politik identitas di Indonesia dapat ditelaah dari dunia peristiwa besar. “Pertama, pada kontestasi pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI) 2017 silam. Manuver politik Anies Baswedan memfasilitasi dan berafiliasi bersama kelompok politik sayap kanan Islam. Kedua, terungkap pada kontestasi pemilihan Presiden 2019 mempertemukan Jokowi dan Prabowo. Kedua tokoh mementaskan pendekatan berbeda, Jokowi tampil sebagai aktor populis dengan selogan ‘reformasi birokrasi’ untuk memfasilitasi masyarakat berpartisipasi akibat terkungkung dalam sistem demokrasi itu sendiri. Sedangkan Prabowo merepresentasikan diri sebagai suara rakyat terpinggir akibat sistem pemerintahan yang kotor. Dalam manuver politiknya Prabowo memfasilitasi dan berafiliasi bersama gerakan Muslim sayap kanan yang telah muncul pada pemilihan Gubernur DKI sebelumnya untuk meraup dukungan dan simpati Muslim tradisional, konservatif, fundamental dan radikal. Prabowo bersenyawa bersama Muslim sayap kanan nampak dari pengukuhan dukungan Ijtima Ulama jilid II versi GNPF dengan menetapkan dan mendukung penuh Prabowo dalam pemilihan Presiden”. (Adon, 2021: 82) Manuver politik Anies dan Prabowo bertalian dan bersenyawa dalam politik identitas yang dibungkus dalam agama.

Politik sektarian sungguh bertentangan dengan semangat Pancasila. Politik identitas tidak menampilkan nilai Pancasila yang mendaulatkan keberagaman tanpa saling mendiskreditkan. Politik identitas “kerap mengafirmasi ke dalam, lahir dari semangat individu, kelompok sosial, komunitas atau

agama tertentu-bertujuan mengukuhkan dan mempertegas keberadaan dan otonomi diri dalam wujud agama, budaya dan gerakan lainnya”. (Baghi, 2012: 251) Politik identitas melakoni pada isu sentral sebagai kelompok yang dimarginalkan. Politik identitas berbasis agama yang mewabah di Indonesia merupakan “kemunduran politik Indonesia sendiri dimana mengkristalkan sentimental sektarian (identitas) tertentu”. (Wijanarko, 2021: 1) Gerakan politik identitas dalam kontestasi dan manuver politik sangat mempengaruhi dan berpotensi menggiring masyarakat pada perpecahan bahkan konflik satu dengan yang lain.

Mengingat kondisi di atas, tulisan ini menitikberatkan pada dampak populisme yang bersenyawa dalam politik identitas terhadap polarisasi masyarakat. Keadaan *chaos* tersebut jika tidak dibenahi dan diminimalisir sedini mungkin akan menggiring pada perpecahan bahkan konflik di antara masyarakat. Mereaktualisasi Pancasila adalah langkah urgen dan fundamen untuk menangkal fenomena populisme identitas. Mereaktualisasikan Pancasila merupakan suatu keharusan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan pada akhirnya tetap menjadi wadah kokoh untuk mengintegrasikan masyarakat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Apa itu Populisme?**

Populisme secara luas dipandang sebagai dinamika alamiah sistem demokrasi; memaksudkan bangkit dan bertumbuhnya gerakan populisme merupakan reaksi langsung rakyat berkaitan dengan sistem dan model demokrasi yang berjalan tidak normal ‘disfungsional’”. (Budiman, 2021: 236) Populisme pertama-tama merupakan respon “perlawanan” terhadap pemerintah dan institusi demokrasi. Populisme dapat mengarahkan pada multitafsir.

Para pemikir dan teoritikus tidak mencapai kata final dalam mendefinisikan apa itu populisme. Cas Mudde dan Cristobal Rovira Kaltwasser dalam buku yang berjudul

*Populisme: A Very Short Introduction* mengartikan “populisme sebagai ideologi politik” sedangkan pemikir yang lain mengartikan populisme sebagai doktrin, strategi dan atau gerakan politik seperti yang dikemukakan oleh Ernesto Laclau, Chantal Mouffe dan Kaltwasser”. (Wijanarko, 2021: 2) Para pemikir mendefinisikan populisme sebagai ideologi, strategi, gerakan dan semuanya bermuara atau berpangkal pada politik. Sulit untuk membahas dan mendefinisikan populisme di luar politik. Hal ini menegaskan bahwa populisme tumbuh dan berkembang dalam ranah politik. Populisme tidak dapat dilihat di luar politik; populisme hanya ada dalam politik. Singkat kata dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa populisme merupakan suatu gerakan politik.

Sebagai suatu gerakan politik populisme kerap bersenyawa dengan gerakan lain untuk membentuk kekuatan dan mengartikulasikannya sebagai kekuatan *populum* ‘rakyat’. Populisme merupakan bangkitnya gerakan politik rakyat ‘*populum*, yang berafiliasi dengan orintasi politik tertentu. Secara umum gerakan populisme dimotori atau digerakan oleh seorang aktor dan atau kelompok yang memiliki pengaruh cukup kuat dan kharismatik. Kedigdayaan aktor populis dalam mengonstruksi suatu gerakan atau strategi politik mampu mempengaruhi emosi bahkan meradikal kekuatan masa.

Populisme merupakan suatu gerakan politik yang dalam pelaksanaannya acapkali bergandengan dengan pelbagai ideologi lainnya. Populisme selalu menampilkan wajahnya dalam perhelatan dan percaturan politik. Populisme senantiasa berbicara dan ada dalam ranah politik. Populisme mendapat medan dan bergaung dalam percaturan dunia politik.

### **2. Fenomena Populisme dan Demokrasi di Indonesia**

Berbicara mengenai populisme sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Umumnya,

*habitus* populisme tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sejarah perkembangan populisme selalu lahir dalam negara sistem demokrasi yang selalu bersenyawa dengan paham lainnya bergantung negara bersangkutan seperti liberalisme (mayoritas negara Eropa), Sosialisme (Venezuela), nasionalisme (Amerika Utara), dan kelompok agama tertentu (Amerika dan Indonesia)". (Wijanarko, 2021: 3) Gerakan populisme selalu bertalian dengan ideologi lainnya untuk mampu memantik sentimental dan membentuk kekuatan politik. Konteks Indonesia populisme agama sangat kuat pengaruhnya terutama gerakan agama mayoritas seperti Muslim yang terlihat jelas pada aksi 212 (bela Islam) dengan sasaran Ahok sebagai tersangka penistaan agama; mengindikasikan bangkitnya gerakan sosial berbasis agama yang bersenyawa untuk mengkristalkan suatu fenomena baru yakni populisme". (Sholikin, 2018: 14-16) Gerakan dan aktor populis selalu melakoni isu sentral dan sensitif terutama isu agama.

Sistem Demokrasi 'demokratis' diklaim dapat memfasilitasi lahirnya populisme politik. Memaksudkan demokrasi pada satu sisi membuka pintu untuk setiap orang berserikat, berpendapat, berpolitik, dan berasosiasi. Tetapi pada sisi lain, tujuan demokrasi yakni menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan bersama jauh dari harapan". (Wijanarko, 2021: 3) Ketidakmampuan demokrasi berdasarkan prinsip dan tujuannya merupakan suatu kelemahan 'kegagalan' demokrasi itu sendiri. Hal mendasar juga terjadi bahwa "kuantitas wacana demokrasi selalu bertolak belakang dengan kualitas demokrasi sendiri". (Baghi, 2012: 283) Situasi demikian dimanfaatkan kaum populis untuk memproduksi ideologi, gerakan dan strategi dalam maneuver politiknya. Isu-isu kegagalan dan kebobrokan demokrasi dimanfaatkan kaum populis untuk mengkristalkan dalil-dalil gerakannya.

Secara umum fenomena populisme di Indonesia menguak di publik menjelang dan saat perhelatan politik berlangsung baik pada

pemilihan legislatif maupun eksekutif. Kiblat demokrasi Indonesia kerap bertalian dengan gerakan populisme dengan berbagai wajah 'politik identitas'. Sebab target utama populis untuk berkuasa dalam bidang politik. Populisme di Indonesia secara umum memainkan politik identitas (agama dan budaya,) sebagai pisau politik. Politik identitas memiliki pengaruh yang kuat dalam perpolitik Indonesia. Politik identitas berbasis agama di Indonesia umumnya pada umat Islam. Vedi R. Hadis dalam karyanya berjudul *Islamic Populism in Asia and the Middle East* (2016) melihat dan mengaitkan aksi bela Islam (aksi bela Al Qur'an) atau familiar dikenal aksi 411 dan 212 dengan sasaran Ahok sebagai terdakwa penistaan agama-juga bersamaan perhelatan pemilihan Gubernur DKI Jakarta merupakan fenomena dan momentum kebangkitan populisme Identitas berbasis Agama "Islam". (Arifin, 2019: 17) Populisme identitas di Indonesia lebih mengarah pada identitas berbasis agama-budaya.

Secara luas demokrasi merupakan "paham yang berlaku umum dan bersifat universalitas, tetapi dalam implementasinya selalu berkenan dengan konteks negara-negara bersangkutan. Konteks Indonesia sebagai salah satu negara sistem demokrasi, prinsip pengaktualisasiannya yakni demokrasi Pancasila, memaksudkan seluruh sistem, prinsip, nilai berujung dan berpangkal pada Pancasila". (Tjarsono, 2013: 882) Landasan demokrasi pada Pancasila mengungkapkan seluruh dimensinya yang termuat pengalaman serta mencerminkan nilai Pancasila itu sendiri. Demokrasi Pancasila tidak sekadar konsep belaka tetapi semangat keseluruhan dalam dinamika demokrasi yang mengasalkan pada Pancasila. Kecenderungan Indonesia dalam dinamika demokrasinya kerap jatuh dalam demokrasi Pancasila prinsipil yakni demokrasi Pancasila sebatas gagasan, teori dan ideologi tanpa diaktualisasikan.

Tujuan utama demokrasi membuka ruang partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam seluruh roda pemerintahan

dan menciptakan keadilan-kebaikan bersama justru bertolak belakang dengan realitas. Kesenjangan terus tercipta baik dalam politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Fenomena ini dilihat dan diklaim kaum populis sebagai disfungsi demokrasi. Dalam artian demokrasi yang sedang dan berjalan tidak sesuai dengan cita-cita “demokrasi sebatas prosedural”. Wajah demokrasi sekarang tidak menampilkan cita-cita awali dan keluhuran dari demokrasi itu sendiri. Situasi tersebut digunakan kaum populis untuk menyerang pemerintah dan institusi demokrasi yang dinilai tidak mampu memenuhi tugasnya.

Gerakan populisme Indonesia seringkali bertalian dengan politik identitas (agama-kultur). Politik identitas berarti menegaskan atau anti terhadap realitas pluralitas; mengabaikan *civil society*. Fenomena politik identitas (agama-kultur) dalam demokrasi Indonesia merupakan regresi dari demokrasi Pancasila. Populisme di Indonesia yang bersenyawa dalam politik dan agama mampu memobilisasi dan memfasilitasi untuk membentuk sistem eksklusivisme dalam masyarakat. Konsekuensi lebih jauhnya ialah terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Agama dan budaya mendoktrinkan faham dan ajaran yang bersifat eksklusif. Konteks Indonesia, “populisme agama sangat kuat untuk memantik sentimental masyarakat dan mampu memobilisasi masa untuk kepentingan atau manuver politik”. (Wijanarko, 2021: 5) Gerakan populisme Indonesia sangat dipengaruhi dan diperkuat oleh agama dan politik identitas.

### **3. Pancasila: Asas Fundamen Keindonesiaan**

Asas fundamen merupakan hal yang mengikat, menjadi pegangan setiap orang. Nilai, norma dan pandangan yang mampu menyatukan semua. Dengan kata lain, asas fundamen merupakan roh pengikat dan perekat kehidupan suatu bangsa-negara. Setiap lembaga dan negara memiliki dasar atau tolak ukur sebagai dasar dari segala

prinsip baik itu hukum, norma, ideologi, pandangan hidup maupun kontrak sosial yang mampu mengintegrasikan masyarakat.

Indonesia memfondasikan Pancasila sebagai dasar dari segala prinsip. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah merumuskan dasar negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Soekarno salah satu bapak pendiri bangsa mengasalkan Pancasila sebagai dasar negara “dalam pidatonya 1 Juni 1945 mengemukakan dasar negara Indonesia (*weltanschauung*) yang dinamakannya Pancasila”. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 81) Di atas Pancasila itulah Indonesia berdiri. Fondasi bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila; Indonesia berhulu dan bermuara pada Pancasila. Seluruh masyarakat Indonesia (yang begitu majemuk: budaya, agama, bahasa, dan ras) dipersatukan dalam satu dasar yakni Pancasila. Singkat kata, Pancasila mengikat dan menyatukan seluruh pluralitas bangsa Indonesia tanpa ada pembedaan satu dengan lain.

Kenyataan Indonesia sebagai negara plural terbesar di dunia bukanlah hanya kesadaran yang lahir dewasa ini tetapi sejak kemerdekaan. Soekarno menyadari hal pluralitas Indonesia tersebut; baginya Pancasila mampu meringkai pluralitas tanpa harus ada penyekatan yang dibalut berdasarkan identitas tertentu, “kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya, tetapi ‘semua buat semua’”. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 71) Gagasan Indonesia berdiri di atas Pancasila bukan untuk digiring pada faham sektarian, golongan tertentu dan memetakan masyarakat berdasarkan politik yang berujung pada disintegritas. Indonesia memfondasikan negara berdasarkan Pancasila mengungkapkan eksistensinya mengarisbawahi keruntuhan sekat-sekat dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Masyarakat dan negara tidak lagi berada dalam terminologi mayoritas-minoritas, kelompok-golongan tertentu tetapi semua

dalam cakupan dan wilayah yang sama yakni Indonesia.

Keindonesiaan merupakan kenyataan yang merangkum pluralitas yang mengungkapkan kesadaran untuk menjaga keutuhan dan merawat nilai Pancasila sebagai dasar dari segala prinsip. Kesadaran ‘aku Indonesia-aku Pancasila’ merupakan langkah konstruktif dan mendesak. Kesadaran “Aku Indonesia-aku Pancasila memaksudkan kesadaran mendasar yang mengungkapkan seluruh identitas historitas, nilai, pluralitas, dan keharmonisan sebagai satu bangsa”. (Riyanto, 2017: 70) Aku Indonesia-aku Pancasila merupakan dua kesatuan yang tak terpisahkan. Indonesia-Pancasila mengatributkan bahwa setaip masyarakat atau bangsa Indonesia benar-benar Indonesia yang berlandaskan Pancasila bukan Indonesia KTP saja; dalam artian mengaku Indonesia tetapi menegaskan Pancasila sebagai dasar negara.

Keindonesiaan juga mengungkapkan fakta sejarah bahwa “manusia Indonesia tidak terbangun atau terdiri dari satu suku, budaya, agama dan geografis yang sama tetapi lahir dari keanekaragaman”. (Riyanto, 2017: 70) Fakta sejarah negara plural memaksudkan semua untuk saling menjunjung tinggi nilai masing masing dan tetap menjaga keharmonisan. Pluralitas tidak sama dengan relativisme sebagaimana kebanyakan orang mendefinisikannya. Pluralisme menekankan pada kesediaan untuk menerima dan mengakui perbedaan tetapi tetap satu yakni Indonesia. Sedangkan relativisme bertendensi melihat semua nilai, budaya dan ras sama saja; tidak ada yang beda. Sebagai bangsa plural Indonesia meringkaskan semuanya dalam satu wadah kokoh yakni Pancasila. Dalam Pancasila termuat sistem pluralitas yang saling menjunjung tinggi dan kesediaan untuk saling menerima perbedaan tanpa harus ada diskriminasi. Pancasila menjadi “dasar eksistensial bagi masyarakat dan bangsa Indonesia: norma dasar, hukum (*rechtsidee*), filosofis (*philosophische grondslag*) ideologi negara, dan pandangan hidup

(*weltanschauung*), serta kontrak sosial mutlak yang bersumber dan bermuara pada Pancasila”. (Hasan, 2017: 3) Bagi Indonesia Pancasila merupakan syarat eksistensial untuk meringkaski keindonesiaannya.

Indonesia hanya dapat berdiri kokoh apabila kenyataan yang paling esensial dihormati dan dijamin yakni Pancasila diterima dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik dalam bidang sosial, pendidikan, hukum maupun politik. Singkat kata Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa-negara Indonesia.

#### **4. Reaktualisasi Pancasila**

Indonesia telah berkomitmen membangun atau mendirikan negara dengan memfondasikan berdasarkan Pancasila sebagai dasar eksistensialnya. Pemakluman “Pancasila sebagai dasar negara mengungkapkan seluruh kebijakan, pandangan, nilai, hukum berlandaskan dan mengamalkan nilai Pancasila itu sendiri. Singkat kata Indonesia adalah negara Pancasila yang mengatributkan paham Pancasila: dari, oleh dan untuk Pancasila”. Dalam hal ini Pancasila merupakan syarat mutlak-urgen bagi negara Indonesia. Syarat mutlak menerangkan bahwa Pancasila milik semua warga Indonesia tanpa harus dipetakan satu dengan yang lain. Sebagaimana “Pancasila ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menerangkan bahwa Pancasila menjadi milik semua warga Indonesia tanpa ada diskriminasi berdasarkan identitas masing-masing”. (Suseno, 2015: 45) Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara meringkaski pluralitas dalam kesatuan yakni Indonesia.

Reaktualisasi Pancasila memaksudkan mengaktualisasikan atau mengaplikasikan kembali nilai-nilai Pancasila; Melihat kembali Pancasila sebagai dasar fundamen ideologi dan dasar hukum Indonesia; membumikan Pancasila sebagai asas eksistensial Indonesia. Reaktualisasikan Pancasila tidak lain merupakan menghidupi kembali lima sila yakni (1) Ketuhanan Yang Maha Esa ‘toleransi hidup beragama’, (2)

Kemanusiaan yang adil dan beradab ‘Menjunjung tinggi hak setiap orang sebagai sesama manusia, (3) Persatuan Indonesia ‘tidak membedakan suku, agama, budaya dan ras tertentu’(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ‘mengutamakan musyawarah mufakat’, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ‘mengedepankan sikap menghargai satu terhadap yang lain’. Dengan kata lain, reaktualisasi Pancasila merupakan langkah *flashback* dan radikal untuk melihat Pancasila sebagai tolak ukur dan nilai mendasar dari segala prinsip. Reaktualisasi Pancasila merupakan “aktualisasi dalam ruang keseharian masyarakat dan atau bangsa Indonesia baik dalam politik, budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan. (Sudiarja, 2006: 881)

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan dari segala hukum Indonesia kerap menjadi narasi belaka saja. Sebab pengaktualisasian “Pancasila belum masif dan intensif ke dalam seluruh dinamika hidup bernegara”. (Manik, 2021: 227) Cita-cita para *founding fathers* melandaskan dan untuk mengamalkan Pancasila dalam keseluruhan hidup bernegara Indonesia jauh dari harapan. Tidak jarang terdapat individu, kelompok dan pelbagai gerakan ingin mengkerdikan Pancasila. Dalam ruang keseharian tidak jarang ditemui fenomena pendangkalan Pancasila berdasarkan klaim sepihak individu, kelompok dan ormas-ormas. Termuat intensi dan niat buruk individu atau kelompok tertentu yang memperlambat atau memfasilitasi Pancasila untuk kepentingan tertentu.

Fenomena populisme Indonesia yang bersenyawa dalam agama dan politik identitas menjadi salah satu habitus pereduksian nilai Pancasila. Dogma agama dan politik identitas diklaim dan diterima sebagai dasar pembenaran baru. Fenomena ini tentunya menggiring masyarakat ke dalam sekat-sekat tertentu dan bertendensi mengeklusifkan satu terhadap yang lain. Eksklusivisme-eksklusivisme tersebut

merupakan *symptom* dari pereduksian Pancasila. Berhadapan fenomena tersebut “Pancasila mesti diamankan dengan semangat Pancasilais “satu untuk semua dan semua untuk satu” direduksi dalam dogma agama dan politik identitas populisme.

Menilik fenomena tersebut, maka “reaktualisasi Pancasila merupakan sebuah keharusan, keniscayaan dan kemutlakan bagi Indonesia untuk tetap menjaga dan melestarikan keindonesiaannya”. (Saeng, 2017: 179) Pancasila menjadi penangkal terhadap gerakan sektarian dan dogmatisasi agama tertentu serta menuntun masyarakat ke dalam integritas utuh sebagai satu bangsa ‘Indonesia’. Reaktualisasi “Pancasila mesti bersifat terstruktur-masif dengan upaya akseleratif dalam seluruh sistem sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila sendiri”. (Manik, 2021: 227) Pancasila tidak akan menjadi dasar jika setiap individu tidak menjadikan dirinya sebagai Pancasilais, dalam artian seluruh dinamika hidup bernegara bersumber dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila”. (Sudiarja, 2006: 881) Maka, Pancasila merupakan inti dan dasar eksistensial manusia Indonesia untuk mengejawantahkan seluruh realitasnya kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi nasional yang definitif; dalam artian kesepakatan semua elemen negara untuk mengakui kedaulatan Pancasila sebagai dasar, asas, filosofi dan sumber hukum hidup bernegara”. (Saeng, 2017: 180) Dalam hal ini Pancasila dilihat sungguh-sungguh urgen dalam hidup berbangsa-bernegara. Maka, reaktualisasi Pancasila merupakan langkah tepat dan urgensi untuk mengatasi keterpecahan dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar Pancasila yang perlu diaktualisasikan tak lain adalah kesediaan semua masyarakat dan bangsa untuk mengamalkan dan membunikan kelima sila dalam ruang hidup bernegara.

### C. Simpulan

Populisme di Indonesia yang bersenyawa dalam politik identitas berbasis

agama-budaya mengembuskan angin pengap bagi keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Politik identitas yang diumbar aktor populis menggoyangkan keutuhan masyarakat dan atau negara. Gerakan populisme secara umum bersifat anti pluralistik dan mengidentifikasi diri sebagai corong rakyat yang mampu mewakili-memenuhi aspirasi rakyat. Untuk memfasilitasi gerakan politik populisme berafiliasi dengan ideologi lainnya seperti agama. Dali-dalih agama dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memobilisasi kekuatan dan membakar sentimental publik. Panorama strategi politik populisme bertentangan dengan nilai dasar demokrasi Pancasila.

Menghadapi gelombang dan wabah populisme yang berpotensi tumbuh kembangnya perpecahan di masyarakat dan integritas negara goyah, Reaktualisasi Pancasila adalah syarat mutlak untuk membendung dan meluruskan kembali praktik politik yang menyimpang. Pancasila sebagai dasar dari segala prinsip negara Indonesia merupakan realitas eksistensial bahwa seluruh dinamika baik politik maupun sosial berlandaskan dan mengamalkan nilai Pancasila sendiri. Paham-paham politik identitas hanya mampu diberantas atau dihanguskan jika Pancasila betul-betul menjwai seluruh manusia Indonesia dalam hayat hidup bersamanya. Penghayatan nilai Pancasila tidak sebatas pada penghafalan lima sila tetapi lebih pada pengaktualisasian dalam ruang keseharian hidup sebagai pribadi aku Indonesia-aku Pancasila. Sebagaimana digaungkan Soekarno bahwa “di atas Pancasila Indonesia berdiri kekal dan abadi”. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 81) Hal ini mengungkapkan hakiki atau esensi dari Pancasila sebagai dasar seluruh hukum, pandangan hidup dan norma hidup bernegara.

Politik identitas *ala* populisme yang mampu menghadirkan perpecahan masyarakat dan negara mendapat jawaban tuntas untuk mengatasinya dalam Pancasila. Maka, suatu keharusan semua elemen

masyarakat, institusi dan negara mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Keindonesiaan akan tetap utuh manakala semuanya sepakat dan berkomitmen menghidupi semangat ‘aku Indonesia-aku Pancasila. Maka, jadilah manusia dan perpolitikan Indonesia yang Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adon. Mathias Jebaru. *Melawan Populisme dengan Semangat Pancasila Sebagai Dasar Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jurnal Politik, Hukum dan Kewarganegaraan. Diakses 4 Desember 2021. <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/1775/1378>.
- Arifin. Syamsul. *Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Maarif Vol.14, No. 1 - Juni 2019. Diakses 7 Desember 2021. <http://www.jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/46/20>.
- Baghi. Felix. *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan: Etika Politik dan Postmodernisme*. Maumere: Ledalero. 2012.
- Budiman Nur. Bahtiar. *Populisme Di Indonesia Sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 01, No. 02, Oktober 2021. <https://ejournalpncasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/53/21>.
- Hasan. Halili. *Merawat Kebinekaan, Membumikan Pancasila: Refleksi Data Riset Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Potret Toleransi*. Dlm. Mangabdi Tuhan dan Mencintai Lyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural. Alphonsus Tjatur Raharso Dkk (Eds). Seri Filsafat Teologi Widya Sasana Vol. 27 No. 26, 2017. Hlm 3-324.



- Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas*. Jurnal Transnasional. Vol. 4, No. 2, Februari 2013. Diakses 06 Desember 2021. Jam 9:9. <file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/Temp/1211-2407-1-SM.pdf>.
- Manik. Sastrawan Toba. Dkk (Plis), *Revitalisasi Pancasila Melalui Dusun Pancasila*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 01, No. 02, Oktober 2021. Diakses 7 Desember 2021. Jam 22: 53. <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/33/14>.
- Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995.
- Riyanto. Armada. *Aku Indonesia, Aku Pancasila: Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruktif Diri* Dalam. Mangabdi Tuhan dan Mencintai Lyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural. Alphonsus Tjatur Raharso Dkk (Eds). Seri Filsafat Teologi Widya Sasana Vol. 27 No. 26, 2017. Hlm. 59-70.
- Saeng. Valentinus. *Revitalisasi Pancasila Demi Indonesia yang Religius dan Beradab*. Dalam. Mangabdi Tuhan dan Mencintai Lyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural. Alphonsus Tjatur Raharso Dkk (Eds). Seri Filsafat Teologi Widya Sasana Vol. 27 No. 26, 2017. Hlm.158-184.
- Sholikin. Ahmad. *Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III*. Madani, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 10 No. 1 2018. <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/373/166>.
- Sudiarja. A dkk (Ed). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Pemikir Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsa*. Jakarta Gramedia 2006.
- Suseno. Magnis Frans. *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*. Jakarta: Kompas. 2015. Magnis: Bunga Rampai.
- Wijanarko. Robertus. *Religious Populism and Public Sphere in Indonesia*. Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 2021. Diakses 17 Juli 2021. <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/8547>.